



# ETIKA PEMERINTAHAN BERBASIS MORALITAS KRISTEN DAN NASIONALISME: IMPLEMENTASI TEOLOGI POLITIK CALVIN DALAM KERANGKA SOEKARNO

Timotius

Sekolah Tinggi Teologi Moriah, Indonesia  
[timotius80@yahoo.com](mailto:timotius80@yahoo.com)

Submitted: 4 March 2025 Accepted: 2 September 2025 Published: 7 October 2025

## Abstract

*This study explores the synergy between Christian morality, especially in the political theology of John Calvin, and Soekarno's nationalism in building governmental ethics in Indonesia. Christian morality in Calvin's political thought strongly emphasizes the values of integrity, honesty, accountability, love, and justice—values that are particularly relevant for addressing issues of corruption, abuse of power, and social inequality. Meanwhile, Soekarnoism prioritizes inclusive nationalism, the spirit of mutual cooperation (gotong royong), and national unity to advance the people's welfare. The author employs a qualitative approach through a literature review to examine the possibility of merging these two value systems to establish governance that is ethical, fair, and centered on people. The results show that this synergy can strengthen the principles of justice, public service, sustainable development, and responsible resource management, especially within the framework of Indonesia's pluralism. This analysis highlights the significance of cooperation among religions, cultures, and institutions in fostering a political culture that is healthy, transparent, and fair.. In the Indonesian context, this collaboration includes Christian values according to Calvin, Soekarno's nationally oriented nationalism, as well as Islamic morality which emphasizes trust (responsibility), 'adl (justice), and ukhuwah (brotherhood). Thus, this study not only connects the ideas of two figures but also integrates them within the framework of national pluralism.*

**Keywords:** Christian Morality, Calvinist Political Theology, Soekarnoism, Governance Ethics, Nationalism, Social Justice, Pluralism.

## Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi sinergi antara moralitas Kristen terkhusus dalam teologi politik John Calvin, dan nasionalisme Soekarno dalam membangun etika pemerintahan di Indonesia. Moralitas Kristen dalam konsep politik Calvin sangat menekankan nilai-nilai integritas, kejujuran, akuntabilitas, kasih, dan keadilan yang relevan untuk menangani masalah korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketimpangan sosial. Sementara itu, Soekarnoisme mengedepankan nasionalisme inklusif, semangat gotong royong, dan kesatuan bangsa untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif, di mana penulis akan meneliti potensi penggabungan kedua kerangka nilai ini untuk menciptakan pengelolaan pemerintahan yang etis, adil, dan berfokus pada kesejahteraan masyarakat. Hasilnya mengindikasikan bahwa kolaborasi ini dapat memperkuat prinsip keadilan, pelayanan publik, pembangunan berkelanjutan, dan manajemen sumber daya yang bertanggung jawab, terutama dalam konteks pluralisme di Indonesia.. Studi ini menegaskan pentingnya kolaborasi lintas agama, budaya, dan

institusi untuk membangun budaya politik yang sehat, transparan, dan berkeadilan. Dalam konteks Indonesia, kolaborasi ini mencakup nilai-nilai Kristiani menurut Calvin, nasionalisme Soekarno yang bercorak kebangsaan, serta moralitas Islam yang menekankan amanah (tanggung jawab), 'adl (keadilan), dan ukhuwah (persaudaraan). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menghubungkan pemikiran dua tokoh, tetapi juga mengintegrasikannya dalam kerangka pluralisme bangsa.

**Kata kunci:** Moralitas Kristen, Teologi Politik Calvin, Soekarnoisme, Etika Pemerintahan, Nasionalisme, Keadilan Sosial, Pluralisme.

---

## PENDAHULUAN

Keberhasilan dari administrasi negara harus dimulai dengan etika yang benar, tentu didasari oleh prinsip moralitas yang sesuai kebenaran dalam agama. Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan dalam hal keragaman budaya, etnis, dan kepercayaannya.<sup>1</sup> Sehingga pengelolaan pemerintahan harus memperhatikan hal-hal tersebut. Dalam kerangka penelitian ini, kolaborasi lintas agama, budaya, dan institusi juga ditegaskan sejak awal. Walaupun pembahasan difokuskan pada pemikiran Calvin dan nasionalisme Soekarno, namun dalam konteks Indonesia yang plural kolaborasi tersebut mencakup juga nilai-nilai moral Islam seperti amanah (tanggung jawab) dan 'adl (keadilan), budaya lokal seperti gotong royong, serta peran institusi negara yang menjamin transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memadukan dua tokoh, tetapi juga menempatkannya dalam horizon pluralisme Indonesia.<sup>2</sup>

Selain itu, dalam sila pertama Pancasila Indonesia mengenal konsep ketuhanan Yang Maha esa. Hal ini menjadi dasar penting bagi pelaksanaan pemerintahan yang memiliki nilai dan tanggung jawab moral yang sesuai prinsip ketuhanan Yang Maha esa. Selain itu, rasa nasionalisme para pejabat publik juga perlu ditingkatkan agar dalam pelaksanaan tata kelola administrasi pelayanan publik dapat dilaksanakan untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, moralitas dan nasionalisme harus menjadi pilar utama dalam membangun manajemen administrasi yang baik.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Dea Varanida, "Keberagaman Etnis Dan Budaya Sebagai Pembangunan Bangsa Indonesia," *PROYEKSI Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 23, no. 1 (2018): 37, <https://doi.org/10.26418/proyeksi.v23i1.2444>.

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI., *Moderasi Beragama*, 2023, <https://moderasi.kemenag.go.id/>.

<sup>3</sup> Robert McKim and Jeff McMahan, eds., "The Morality of Nationalism," preprint, Oxford University Press, July 10, 1997, <https://doi.org/10.1093/oso/9780195103915.001.0001>.

Meskipun nasionalisme sering didefinisikan sebagai rasa cinta tanah air, banyak masyarakat dan pejabat publik memahami nasionalisme secara pasif, yaitu hanya sebatas simbolisme seperti upacara bendera, menyanyikan lagu kebangsaan, atau menggunakan atribut nasional.<sup>4</sup> Padahal, nasionalisme seharusnya tidak hanya menjadi ekspresi emosional, tetapi juga diwujudkan dalam kontribusi nyata terhadap pembangunan bangsa.<sup>5</sup> Demikian juga, banyak pejabat publik yang menggunakan jargon nasionalisme dalam kampanye politik, tetapi gagal menerapkan kebijakan yang mencerminkan kepedulian terhadap kesejahteraan rakyat.<sup>6</sup> Kelemahan nasionalisme yang hanya bersifat simbolik ini dapat memperlambat kemajuan bangsa. Dalam konteks pemerintahan, nasionalisme seharusnya mendorong pejabat publik untuk bekerja dengan integritas, mengutamakan kepentingan rakyat, serta berkontribusi dalam pembangunan yang berkelanjutan.<sup>7</sup> Oleh karena itu, nasionalisme perlu dihayati sebagai panggilan moral yang menuntut tindakan nyata, bukan sekadar retorika politik. Dalam konteks ini, rasa nasionalisme jangan didefinisikan hanya sebagai rasa cinta tanah air, tetapi harus dihayati sebagai panggilan untuk berkontribusi bagi kemajuan dan pembangunan bangsa.<sup>8</sup>

Pembahasan tentang moralitas tidak didapat dipisahkan dengan pemikiran John Calvin yang sangat menekankan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan akuntabilitas<sup>9</sup>, yang sangat diperlukan bagi pemerintahan Indonesia dalam menangani permasalahan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Selain karena Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduknya muslim 87%.<sup>10</sup> Dikarenakan nilai-nilai moralitas Calvin bersifat universal, maka penulis melihat nilai-nilai moralitas Calvin dapat menjadi titik temu dengan nilai-nilai Islam yang hidup di tengah masyarakat. Dalam Islam, konsep amanah

---

<sup>4</sup> Budi Gustaman, "Satwa Dan Nasionalisme Indonesia," Kumparan.Com, 2025, [https://kumparan.com/budi-gustaman-1706638739597966372/satwa-dan-nasionalisme-indonesia-23L4jEzHnnt?utm\\_source=chatgpt.com](https://kumparan.com/budi-gustaman-1706638739597966372/satwa-dan-nasionalisme-indonesia-23L4jEzHnnt?utm_source=chatgpt.com).

<sup>5</sup> teknosional.com, "Sikap Nasionalisme Adalah Cinta Tanah Air," Teknosional.Com, 2024, [https://www.teknosional.com/sikap-nasionalisme-adalah/?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.teknosional.com/sikap-nasionalisme-adalah/?utm_source=chatgpt.com).

<sup>6</sup> Rafif Sani et al., "Implikasi Pejabat Publik Berkampanye Dalam Kontestasi Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 11 (2024), 25.

<sup>7</sup> U N Economic and Social Council, *Principles of Effective Governance for Sustainable Development* (E/2018/44-E/C.16/2018/8, Retrieved from <https://publicadministratio.n.un...>, 2018).

<sup>8</sup> Singgih Tri Sulistiyono, "Nasionalisme, Negara-Bangsa, Dan Integrasi Nasional Indonesia: Masih Perluah?," *Jurnal Sejarah Citra Lekha* 3, no. 1 (2018): 9.

<sup>9</sup> Sheldon S Wolin, "Calvin and the Reformation: The Political Education of Protestantism," *The American Political Science Review* 51, no. 2 (January 1957): 428–53, <https://doi.org/10.2307/1952201>.

<sup>10</sup> Carool Kersten, *Islam in Indonesia: The Contest for Society, Ideas and Values* (Oxford University Press, 2015), 65.

(tanggung jawab) dan 'adl (keadilan) sejalan dengan integritas dan keadilan yang diajarkan Calvin. Dengan demikian, penggunaan teologi politik Calvin tidak dimaksudkan untuk mengganti nilai lokal atau agama mayoritas, melainkan sebagai sumbangan etis yang dapat dipadukan dengan nasionalisme Soekarno dan nilai-nilai Islam dalam membangun etika pemerintahan yang inklusif.<sup>11</sup> Selain itu, jumlah umat Kristen di Indonesia berkisar di 11 % dari populasi atau sekitar 29 juta jiwa<sup>12</sup>, sehingga pemikiran politik Calvin tetap bisa berkontribusi dalam wacana etika pemerintah. Menurut Calvin, penerapan prinsip moralitas Kristen dalam administrasi negara dapat menjadi landasan yang kuat untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan adil.

Di sisi lain, presiden pertama Indonesia, Soekarno, menekankan pentingnya nasionalisme.<sup>13</sup> Nasionalisme yang dia ajarkannya bersifat inklusif, menekankan persatuan seluruh elemen bangsa tanpa diskriminasi, berlandaskan pada gotong royong, dan berpijak pada Pancasila sebagai falsafah negara. Maka dari itu, usaha mengintegrasikan prinsip-prinsip moralitas Kristen menurut teologi politik Calvin ke dalam kerangka Soekarnoisme sangat penting untuk dilakukan, sehingga etika pemerintahan Indonesia tidak hanya berdasar pada kepentingan politik, tetapi juga pada nilai-nilai moral yang menjunjung tinggi kemanusiaan.<sup>14</sup> Integrasi ini dapat memperkuat fondasi etika pemerintahan dengan menggabungkan prinsip-prinsip moral Kristen dalam politik Calvin dan nilai-nilai nasionalisme Soekarno. Hal ini berpotensi menciptakan keseimbangan antara kepentingan nasional dan tanggung jawab moral dalam penyelenggaraan negara. Dengan demikian, Indonesia dapat membangun sistem pemerintahan yang tidak hanya berhasil dalam hal politik, namun juga memiliki integritas dan mendukung kesejahteraan rakyat.

Mengimplementasikan teologi politik Calvin dalam kerangka Soekarnoisme memberikan tantangan bagi penulis untuk menelusuri dan memikirkan bagaimana nilai-

---

<sup>11</sup> David VanDrunen, *Natural Law and the Two Kingdoms: A Study in the Development of Reformed Social Thought* (Wm. B. Eerdmans Publishing, 2010), <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=jnd9vRw51TwC&oi=fnd&pg=PR9&dq=VanDrunen,+David.+Natural+Law+and+the+Two+Kingdoms:+A+Study+in+the+Development+of+Reformed+Social+Thought.+Wm.+B.+Eerdmans,+2010.&ots=cPQc2hNP4c&sig=1EPRaEPNUFuFQ-7BH4kI4SUJQ10>.

<sup>12</sup> K. Caileigh Stirling, "5 Facts about Muslims and Christians in Indonesia," Pew Research Center, 2024, [https://www.pewresearch.org/short-reads/2024/03/28/5-facts-about-muslims-and-christians-in-indonesia/?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.pewresearch.org/short-reads/2024/03/28/5-facts-about-muslims-and-christians-in-indonesia/?utm_source=chatgpt.com).

<sup>13</sup> Kristoforus Bagas Romualdi, "Analisis Pemikiran Soekarno Tentang Nasionalisme," *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 10 (2024): 3765.

<sup>14</sup> Laura Stoker, "Interests and Ethics in Politics," *The American Political Science Review* 86, no. 2 (January 1992): 370, <https://doi.org/10.2307/1964226>.

nilai moralitas Kristen, terkhusus menurut prinsip politik Calvin dapat memberikan kontribusi dalam membentuk sistem pemerintahan yang adil dan berkelanjutan. Calvin dalam teologi politiknya, sangat mementingkan konsep panggilan (*vocatio*), dalam konsep tersebut, dia mengharapkan agar setiap warga negara bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan nilai-nilai tata krama dan tata nilai.<sup>15</sup> Hal ini selaras dengan norma-norma yang diusung oleh Soekarno tentang pentingnya nasionalisme yang diwujudkan dalam peran aktif masyarakat dalam Pembangunan.<sup>16</sup> Dengan demikian, terdapat potensi untuk menciptakan sinergi antara moralitas Kristen dan nasionalisme dalam membangun pemerintahan yang lebih baik.

Signifikansi usaha mengintegrasikan etika pemerintahan yang berpijak pada teologi politik Calvin dan nasionalisme Soekarno dalam konteks Indonesia tidak hanya penting bagi akademisi, tetapi juga sangat diperlukan bagi para pembuat kebijakan publik dan masyarakat luas. Jika para pembuat kebijakan memahami hubungan antara moralitas, dan nasionalisme dengan baik, akan menghasilkan solusi yang berbasis pada nilai-nilai yang universal dan kontekstual.<sup>17</sup> Penelitian ini berupaya untuk menyelidiki dan menganalisis bagaimana teologi politik Calvin, terutama konsep moralitasnya, serta pemahaman Nasionalisme dalam Soekarnoisme dapat diterapkan dalam politik Indonesia untuk berkontribusi dalam menciptakan pemerintahan yang lebih etis dan berfokus pada kesejahteraan rakyat.

Penulis menelusuri berbagai jurnal dan buku, terdapat beberapa karya yang membahas tentang teologi politik Calvin dan pemikiran Soekarno, berikut adalah tiga di antaranya:

Matthew J. Tuininga dalam bukunya berjudul "*Calvin's Political Theology and the Public Engagement of the Church: Christ's Two Kingdoms*," menganalisa teologi politik John Calvin, khususnya doktrin dua kerajaan, dan implikasinya terhadap peran gereja dalam ranah publik. Tuininga menggunakan metode studi teologis dengan analisis historis terhadap karya-karya Calvin.<sup>18</sup> Namun, Tuininga lebih banyak berfokus pada

---

<sup>15</sup> John Calvin, *Institutes of The Christian Religion*, ed. John T. McNeill (Philadelphia: Westminster Press, 1960).

<sup>16</sup> Hafidz Abbas, "Pemikiran Bung Karno Dan Cetak Biru Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan," Edura News: Media Komunitas Pendidikan, 2023, [https://edura.unj.ac.id/edura-news/?p=5891&utm\\_source=chatgpt.com](https://edura.unj.ac.id/edura-news/?p=5891&utm_source=chatgpt.com).

<sup>17</sup> McKim and McMahan, "The Morality of Nationalism", 30."

<sup>18</sup> Matthew J Tuininga, *Calvin's Political Theology and the Public Engagement of the Church: Christ's Two Kingdoms* (Cambridge University Press, 2017), 65.

teologi Calvin dalam konteks Eropa, bukan dalam konteks nasionalisme di negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Yusak Soleiman dalam jurnalnya membahas akan *“Pemikiran Filsafat John Calvin dan Relevansinya,”* Soleiman menjelaskan pemikiran filsafat John Calvin, khususnya dalam konteks teologi dan relevansinya dalam kehidupan modern. Akan tetapi, Soleiman tidak menjelaskan penerapan teologi politik Calvin dalam konteks nasionalisme Soekarno. Franz Magnis-Suseno, dalam karyanya yang berjudul *“Etika Politik,”* secara luas mengulas tentang etika politik secara umum, dengan fokus pada prinsip-prinsip moral dasar dalam negara modern.<sup>19</sup> Akan tetapi dia tidak mengintegrasikan teologi politik Calvin dengan konsep nasionalisme Soekarno.

Berdasarkan telaah terhadap literatur yang ada, penelitian-penelitian sebelumnya telah banyak mengkaji teologi politik John Calvin, khususnya dalam konteks etika kepemimpinan dan tanggung jawab moral pemerintah. Namun, kajian yang secara mendalam membahas nasionalisme Soekarno, terutama dalam kerangka etika pemerintahan dan integrasinya dengan nilai-nilai moral universal, masih sangat terbatas. Lebih penting lagi, belum ditemukan penelitian yang secara eksplisit mengintegrasikan teologi politik Calvin dengan pemikiran nasionalisme Soekarno untuk membangun model etika pemerintahan yang kontekstual di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi kekurangan tersebut dengan menyajikan sintesis baru yang relevan dalam konteks pluralisme dan tantangan tata kelola pemerintahan di Indonesia.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana konsep moralitas Kristen dalam teologi politik Calvin dapat diterapkan dalam administrasi pemerintahan di Indonesia? Bagaimana nilai-nilai nasionalisme Soekarno dapat diintegrasikan dengan moralitas Kristen dalam membangun pemerintahan yang adil dan transparan? Bagaimana sintesis kedua konsep ini dapat memberikan kontribusi terhadap etika pemerintahan di Indonesia dalam konteks pluralisme?

---

<sup>19</sup> Franz Magnis-Suseno, *“Etika Politik. Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern,”* (Preprint, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), 53.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif melalui studi pustaka untuk menyelidiki tulisan-tulisan John Calvin tentang konsep teologi politiknya serta menelusuri pidato dan karya-karya Soekarno yang menguraikan nilai-nilai nasionalisme. Penulis memilih metode ini, karena dengan metode ini penulis dapat lebih mengerti arti teks-teks yang menjadi sumber data utama. Melalui penelitian ini penulis berharap dapat mengungkap bagaimana konsep moralitas Kristen dalam pemikiran politik Calvin dan nasionalisme dalam konsep Soekarno dapat diimplementasikan dalam perpolitikan di Indonesia khususnya pembuat kebijakan publik.

Penulis akan meneliti literatur dari karya-karya utama Calvin, termasuk *Institutes of the Christian Religion*, serta pidato dan tulisan Soekarno, dan jurnal akademik yang relevan dengan topik penelitian. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif-analitis, di mana data akan dikelompokkan sesuai dengan tema utama, lalu dibandingkan dan disintesis untuk menemukan hubungan antara moralitas Kristen dalam teologi politik Calvin dan nasionalisme Soekarno dalam etika pemerintahan. Pemilihan literatur didasarkan pada relevansi dengan tema penelitian serta kredibilitas sumbernya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Moralitas Kristiani Menurut Konsep politik John Calvin dalam Administrasi Pemerintahan Indonesia**

Moralitas dalam pemikiran Calvin, sangat mengutamakan integritas, kejujuran, dan akuntabilitas<sup>20</sup>, sebagai fondasi penting bagi pejabat publik pada saat melaksanakan tugas pemerintahan yang adil dan bersih. Prinsip-prinsip moralitas dalam pemikiran Calvin sangat dibutuhkan di Indonesia sebagai upaya pemerintah memberantas korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Calvin menegaskan bahwa para pemimpin publik memiliki tanggung jawab tidak hanya kepada masyarakat, tetapi juga kepada Tuhan, yang mempercayakan mereka untuk menjaga kesejahteraan rakyat.<sup>21</sup> Selain itu, konsep panggilan (*vocatio*) Tuhan dalam teologi Calvin dimana dia melihat penjabat publik menduduki jabatan tersebut merupakan panggilan dari Allah, hal itu mengharuskan setiap pejabat publik memiliki moral yang tinggi saat menjalankan perannya sebagai

---

<sup>20</sup> Calvin, *Institutes of The Christian Religion*, III, 5, 6.

<sup>21</sup> Tuininga, *Calvin's Political Theology and the Public Engagement of the Church: Christ's Two Kingdoms*, 96.

pertanggung jawaban kepada Allah yang memanggil mereka untuk menduduki jabatan tersebut.<sup>22</sup> Konsep Calvin tentang panggilan ini perlu di implementasi dengan melakukan pelatihan dan pembimbingan bagi para pejabat publik sebagai bagian dari pendidikan moral dalam upaya menciptakan transparansi dalam mengelola administrasi negara.<sup>23</sup> Selain itu, moralitas dalam pemikiran Calvin dapat menjadi kerangka etis dalam usaha memberi pengaruh pada kebijakan publik melalui integrasi nilai-nilai seperti kasih, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama. Dalam konteks ini, moralitas tidak hanya menjadi aturan normatif tetapi juga motivasi untuk menciptakan pemerintahan yang berfokus pada pelayanan kepada masyarakat yang transparan dan adil. Hal ini relevan dalam menghadapi masalah-masalah yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia, seperti ketimpangan sosial<sup>24</sup> dan pengabaian terhadap hak-hak minoritas.<sup>25</sup>

Selanjutnya penulis akan membahas konsep politik Calvin yang dapat diterapkan sebagai tanggung jawab moral untuk pelaksanaan administrasi pemerintahan Indonesia yang adil dan bersih:

#### **a. Konsep Panggilan (Vocatio) dan Tanggung Jawab Moral**

Dalam pemikiran Calvin, panggilan (vocatio) tidak hanya mencakup tugas religius, tetapi juga tugas sekuler, termasuk sebagai pejabat publik yaitu, individu yang memegang jabatan dalam struktur pemerintahan negara, seperti pegawai negeri sipil (PNS), kepala daerah, atau anggota legislatif yang memiliki tanggung jawab moral untuk melayani masyarakat di pemerintahan.<sup>26</sup> Setiap pejabat dipanggil dan bertanggung jawab untuk melayani masyarakat dengan tanggung jawab moral yang tinggi.<sup>27</sup> Pejabat publik perlu menyadari bahwa tugas mereka sebagai pelayan publik bukan hanya profesi tetapi merupakan panggilan Allah untuk mengusahakan masyarakat yang sejahtera dan adil.<sup>28</sup> Konsep panggilan dalam kaitan dengan moralitas Calvin ini sangat dibutuhkan di Indonesia dalam upaya menciptakan kepemimpinan yang berdedikasi dan berkomitmen

---

<sup>22</sup> John Calvin, *Institutes of the Christian Religion*, ed. John T. McNeill (Westminster John Knox Press, 1960), III, 7, 9.

<sup>23</sup> C Van Til, *Christian Theistic Ethics* (Westminster Theological Seminary, 1958), 86.

<sup>24</sup> Edison Edison and Muhammad Andriansyah, "Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Sosial: Tinjauan Terhadap Kebijakan Pembangunan Di Indonesia," *Journal Development* 11, no. 2 (2023): 135.

<sup>25</sup> Purwaningsih Purwaningsih et al., "Pengabaian Hak-Hak Kewarganegaraan Kelompok Minoritas Dan Kegagalan Demokrasi Dalam Novel Maryam Karya Okky Madasari," *Aksara* 35, no. 2 (2023): 267.

<sup>26</sup> Hendra Winarjo, "John Calvin Tentang Kerja Dan Relevansinya Dengan Pekerja Kristen Kontemporer Di Indonesia," *Societas Dei: Jurnal Agama Dan Masyarakat* 10, no. 1 (2023): 108.

<sup>27</sup> John Calvin, *Calvin: Institutes of the Christian Religion*, ed. John T McNeill (Westminster John Knox Press, 1960), 123.

<sup>28</sup> Calvin, *Institutes of The Christian Religion*, III, 6, 7.

untuk melaksanakan pemerintahan didasarkan moralitas sehingga bebas dari korupsi. Melalui penerapan konsep ini, pejabat publik dapat di motivasi untuk melayani masyarakat Indonesia dengan pemahaman bahwa kedudukan mereka sebagai pejabat merupakan panggilan dari Allah sehingga harus dijalankan dengan moralitas tinggi karena setiap warga negara Indonesia adalah ciptaan Tuhan yang sama derajatnya, hal itu akan semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.<sup>29</sup>

### **b. Prinsip Keadilan dalam Pengelolaan Administrasi Negara**

Jenis moralitas yang lain yang ditekankan oleh Calvin adalah keadilan. Calvin menekankan pentingnya memperlakukan semua individu dengan adil.<sup>30</sup> Konsep ini merupakan aspek penting yang perlu di miliki oleh seorang pemimpin yang memiliki moralitas yang tinggi. Calvin menegaskan bahwa seorang pejabat publik harus melaksanakan keadilan sosial, menjamin terjadinya keseimbangan kekuasaan, dan memastikan tidak ada diskriminasi terhadap minoritas.<sup>31</sup> Prinsip ini sangat sesuai dengan konteks Indonesia yang majemuk, maka pemahaman ini dapat diimplementasikan di Indonesia. Penerapannya dapat melalui strategi reorganisasi sumber daya dan dalam hukum harus dipastikan tidak terjadi diskriminasi dalam penegakan hukum. Dengan demikian, moralitas Kristiani memberikan kerangka bagi pemerintah untuk bertindak adil dan memperjuangkan hak-hak masyarakat, terutama kelompok minoritas.<sup>32</sup> Pemerintah juga perlu membuat aturan dan kebijakan yang dapat memberikan perlindungan kepada penduduk yang rentan terhadap diskriminasi, karena prinsip pemerintah yang baik dan benar adalah melayani semua penduduk baik yang miskin atau kaya.<sup>33</sup>

### **c. Integritas dan Kejujuran sebagai Pilar Administrasi Pemerintahan**

Calvin menegaskan bahwa integritas dan kejujuran adalah dasar penting yang harus dimiliki oleh seorang pimpinan yang bermoral.<sup>34</sup> Menurutnya, pemimpin yang jujur dan berintegritas menggambarkan karakter Kristus dan dapat menjadi teladan bagi

---

<sup>29</sup> David VanDrunen, *Natural Law and the Two Kingdoms: A Study in the Development of Reformed Social Thought* (Wm. B. Eerdmans Publishing, 2010), 78.

<sup>30</sup> Calvin, *Institutes of The Christian Religion*, III, 6, 5.

<sup>31</sup> Calvin, *Institutes of The Christian Religion*, II, 8, 9.

<sup>32</sup> Alister E. McGrath, *Christian Theology: An Introduction* (United Kingdom: Wiley-Blackwell, 2013), 95.

<sup>33</sup> Vic McCracken, *Christian Faith and Social Justice: Five Views* (Bloomsbury Publishing USA, 2014), 89.

<sup>34</sup> Calvin, *Institutes of The Christian Religion*, III,7,9.

masyarakat Indonesia, karena pejabat publik yang baik dan jujur menjadi kebanggaan masyarakat.<sup>35</sup> Implementasi prinsip integritas dan kejujuran dalam administrasi pemerintahan di Indonesia bisa dilaksanakan melalui penguatan sistem akuntabilitas dan transparansi, misalnya dengan memastikan laporan keuangan publik tersedia secara mudah dan akurat bagi masyarakat.<sup>36</sup> Selain itu, tata kelola pemerintah yang berintegritas dan jujur dapat menghindarkan para pejabat dari konflik kepentingan, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang lebih bersih dan terpercaya.<sup>37</sup> Dengan demikian, integrasi prinsip integritas dan kejujuran dalam kebijakan publik dapat menjadi langkah konkret untuk mencegah korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Well menjelaskan bahwa Calvin sangat mengharapkan para pemimpin mengimplementasikan kehidupan yang berintegritas dan jujur sesuai perintah Ilahi, sehingga setiap peraturan dan kebijakan publik yang dibuat, seharusnya mencerminkan kebijakan publik diwujudkan dengan adanya keadilan sosial, kepedulian pada masyarakat kecil, dan senantiasa melayani sesama manusia dengan derajat yang sama.<sup>38</sup> Lebih jauh, pemimpin perlu melihat tugas dan tanggung jawab mereka sebagai amanat dari Tuhan sehingga senantiasa dapat mengutamakan kejujuran sebagai prinsip utama dalam setiap aspek pelayanan publik. Pemerintah Indonesia dapat membangun sistem administrasi yang menekankan efisiensi serta menghargai prinsip-prinsip moral yang melayani masyarakat secara menyeluruh dengan memahami konsep-konsep Calvin tentang panggilan, keadilan, serta integritas dan kejujuran.

## 2. Nasionalisme Soekarno sebagai Kerangka Persatuan

Soekarnoisme mementingkan sikap nasionalisme yang bersifat inklusif dan semangat gotong royong dari setiap warga negara Indonesia.<sup>39</sup> Kedua nilai ini, sangat penting dimiliki oleh pejabat publik dalam melaksanakan tugas pemerintahan dalam melayani masyarakat majemuk. Menurut Soekarnoisme, nasionalisme dipahami sebagai

---

<sup>35</sup> Calvin, *Institutes of The Christian Religion*, III,8,9.

<sup>36</sup> VanDrunen, *Natural Law and the Two Kingdoms: A Study in the Development of Reformed Social Thought*, 75.

<sup>37</sup> Donald K McKim, *Introducing the Reformed Faith: Biblical Revelation, Christian Tradition, Contemporary Significance* (Westminster John Knox Press, 2001), 90.

<sup>38</sup> David F Wells, *The Courage to Be Protestant: Truth-Lovers, Marketeters, and Emergents in the Postmodern World* (Wm. B. Eerdmans Publishing, 2008), 109.

<sup>39</sup> George McT Kahin, *Nationalism and Revolution in Indonesia* (Cornell University Press, 2018).

komitmen untuk memajukan kesejahteraan bersama tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang agama atau etnis.<sup>40</sup> Ini membuka peluang untuk mengintegrasikan nilai-nilai moralitas Kristiani dalam kerangka yang lebih luas, yakni pembangunan nasional yang bersifat inklusif.<sup>41</sup> Pendekatan nasionalisme Soekarno yang inklusif memberikan ruang untuk mengintegrasikan nilai-nilai moralitas Kristiani, seperti kasih dan keadilan, ke dalam pembangunan nasional. Dalam hal ini, nilai-nilai moralitas Kristen dalam konsep Calvin bisa diintegrasikan dengan pemikiran tentang gotong royong Soekarnoisme dalam usaha menghasilkan sistem kelola pemerintah Indonesia yang lebih berperikemanusiaan dan peduli kepada kelompok menengah ke bawah dan minoritas. Misalnya, konsep keadilan, integritas dan kejujuran dalam pemikiran Calvin bisa diimplementasikan di lingkup pejabat publik sehingga mereka memiliki rasa kepedulian sosial yang tinggi, agar menghasilkan pembangunan Indonesia yang berkesetaraan sosial, adil dan berkesinambungan.<sup>42</sup>

Prinsip gotong royong dalam Soekarnoisme dapat dipadukan dengan konsep panggilan (*vocatio*) dalam pemikiran Calvin, karena setiap pejabat publik dipandang bukan sekadar bekerja sebagai profesi, melainkan menjalankan amanat ilahi untuk melayani rakyat dengan integritas, keadilan, dan kejujuran. Oleh karena itu, semangat gotong royong yang mengharuskan keterlibatan aktif masyarakat mendapatkan dasar moral yang kuat, sehingga tujuan utama pemerintahan yang memprioritaskan kesejahteraan rakyat dapat tercapai dengan adil dan berkelanjutan. Pemerintah dapat memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan, sambil memastikan bahwa setiap kebijakan publik mengandung nilai kesetaraan sosial untuk semua masyarakat Indonesia. Selain itu, mengintegrasikan prinsip gotong royong dengan konsep panggilan ini dapat diperluas untuk menangani berbagai masalah sosial, seperti ketimpangan ekonomi dan diskriminasi, melalui program kemitraan yang melibatkan semua lapisan masyarakat.<sup>43</sup> Selain itu, prinsip gotong royong dan panggilan dapat dikembangkan lebih luas lagi dalam menanggulangi masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat, prinsip ini dapat diperluas lagi untuk mengatasi tantangan sosial,

---

<sup>40</sup> Ir Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi*, vol. 1 (Bangkitlah Bangsaku, 1963).

<sup>41</sup> Sukarno, *Nasionalisme, Islamisme Dan Marxisme* (Jajasan" Pembaruan", 1963).

<sup>42</sup> Robert D Orr, "The Role of Christian Belief in Public Policy," *Christian Bioethics: Non-Ecumenical Studies in Medical Morality* 13, no. 2 (January 2007): 199–209, <https://doi.org/10.1080/13803600701473489>.

<sup>43</sup> Dede Setiawan, Sulaiman Abdul Aziz, and Cecep Hilman, "Pengembangan Social Dan Pembangunan Pendidikan Berbasis Masyarakat," *Jurnal Inovasi, Evaluasi Dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP)* 2, no. 2 (2022): 74–84.

seperti kesenjangan ekonomi, dan diskriminasi<sup>44</sup>, melalui program-program kemitraan yang mengikutsertakan semua lapisan masyarakat.

Integrasi konsep gotong royong dari Soekarnoisme dan moralitas Kristiani dalam pemikiran politik Calvin, dapat diwujudkan melalui kebijakan publik yang berbasis pada nilai-nilai global diantaranya, keadilan dan kesejahteraan bersama.<sup>45</sup> Pemerintah dapat mempublikasikan kebijakan-kebijakan publik yang menekankan pemerataan, tidak hanya menguntungkan kelompok mayoritas tetapi juga memperhatikan kelompok minoritas, sehingga seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali mendapatkan manfaat yang sama dari kebijakan pejabat publik. Dengan demikian, kebijakan tersebut selaras dengan cita-cita Soekarno yang sangat mementingkan persatuan bangsa dalam menggapai cita-cita kemerdekaan.<sup>46</sup>

Prinsip nasionalisme dan gotong royong yang di kumandangkan oleh Soekarno dapat menjadi jalan masuk yang baik dalam membangun struktur persatuan yang kuat dan berkesinambungan. Integrasi nilai-nilai moralitas Kristiani dan prinsip-prinsip Soekarnoisme tidak hanya memperkuat dasar-dasar etika pemerintahan, tetapi juga menciptakan sinergi yang mendukung pembangunan nasional yang adil dan inklusif.

### **3. Integrasi Moralitas Kristiani menurut Calvin dan Soekarnoisme**

Upaya mengintegrasikan moralitas Kristiani menurut Calvin dengan Soekarnoisme memberi peluang keberhasilan terlaksananya integrasi yang baik antara prinsip-prinsip etika dalam teologi politik Calvin dan nasionalisme. Nilai-nilai agama dan nasionalisme. Moralitas Kristiani dalam pemikiran Calvin, yang berdasarkan konsep keadilan, panggilan, integritas dan kejujuran<sup>47</sup>, mampu memberikan fondasi moral yang kuat bagi pemerintah Indonesia. Menurut teologi politik Calvin, pemerintah adalah alat Tuhan untuk menegakkan keadilan dan menjaga ketertiban.<sup>48</sup> Pemahaman ini menegaskan bahwa tugas pemerintah bukan hanya menyelenggarakan administrasi negara, tetapi

---

<sup>44</sup> Akh Muzakki, "Ethnic Chinese Muslims in Indonesia: An Unfinished Anti-Discrimination Project," *Journal of Muslim Minority Affairs* 30, no. 1 (2010): 81–96.

<sup>45</sup> Julianti Ratnasari Ningsih, Fayla Lakmi Dara, and Widya Ananda Minda Putri, "Pancasila Sebagai Dasar Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial," *Advances In Social Humanities Research* 1, no. 4 (2023): 462–70.

<sup>46</sup> Airlangga Pribadi Kusman, "Politik Sosio-Nasionalisme Soekarno Dan Kebangsaan Progresif," *Jurnal Pancasila* 3, no. 2 (n.d.): 67.

<sup>47</sup> Calvin, *Institutes of The Christian Religion*, V, 8, 9.

<sup>48</sup> Calvin, *Institutes of The Christian Religion*, IV, 7, 6.

adalah perwakilan dari kehendak Allah menjadi pelayan bagi masyarakat semua golongan tanpa terkecuali.<sup>49</sup>

Paradigma ini sangat sesuai dan tetap dipakai untuk mengintegrasikan konsep Soekarnoisme, terkhusus pada saat adanya kerinduan aparaturnegara berkeinginan menciptakan pemerintahan yang berkeadilan dan tidak ada diskriminasi. Soekarno menekankan pentingnya persatuan dan gotong royong sebagai landasan untuk mencapai kesejahteraan bersama.<sup>50</sup> Pada saat nilai-nilai moralitas kristiani, seperti keadilan, panggilan, integritas dan kejujuran diintegrasikan ke dalam kerangka Soekarnoisme, hal ini dapat membantu memperkuat orientasi pemerintah pada pelayanan kepada masyarakat yang paling membutuhkan. Misalnya, prinsip keadilan dapat diterjemahkan dalam kebijakan perlindungan sosial yang lebih inklusif, sementara integritas dan kejujuran mendorong penegakan hukum yang tidak transparan.

Integrasi ini dapat diimplementasikan dalam kebijakan publik yang mendasarkan pada nilai-nilai moral dan keadilan. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan adalah salah satu contoh konkret di mana moralitas Kristiani dan nasionalisme Soekarnoisme dapat bekerja bersama. Dalam perspektif moralitas Calvin, manusia dipanggil untuk menjaga ciptaan Tuhan<sup>51</sup>, sedangkan dalam Soekarnoisme, pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan untuk kepentingan seluruh rakyat.<sup>52</sup> Sinergi ini akan menciptakan peraturan dan kebijakan yang mementingkan pengelolaan alam yang bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya bagi kepentingan politik.

Selain itu, semangat pemberantasan korupsi dan pelaksanaan pemerintah yang adil dan jujur mencerminkan asas dan prinsip moralitas Kristian dalam pemikiran Calvin dan semangat gotong royong dalam Soekarnoisme. Pemerintah yang berintegritas dan jujur akan menghasilkan kultur berpolitik yang baik, karena transparansi, kejujuran dari pemerintah pasti akan menghasilkan tingginya tingkat kepercayaan kepada Masyarakat<sup>53</sup>, dan dengan sendirinya, peraturan yang dibuat oleh pejabat publik akan berpusat kepada pelayanan kepada masyarakat dan bukan pada kepentingan pribadi

---

<sup>49</sup> Antonius Un, "Pendasaran Teologis Bagi Pemikiran Politik John Calvin," *Verbum Christi: Jurnal Teologi Reformed Injili* 2, no. 1 (2015): 117.

<sup>50</sup> Mima Defliyanti Saragih and Yakobus Ndona, "Peningkatan Solidaritas Dan Kesejahteraan Bersama Dalam Sila Ke-5 Pancasila," *Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat* 2, no. 2 (2024): 219.

<sup>51</sup> Calvin, *Institutes of The Christian Religion*, IV, 8, 9.

<sup>52</sup> Hasto Kristiyanto, "'Geopolitik Bung Karno Progressive Geopolitical Coexistence'," (*Universitas Pertahanan Republik Indonesia*, 2023), 93.

<sup>53</sup> Norbert Götz and Carl Marklund, eds., *The Paradox of Openness: Transparency and Participation in Nordic Cultures of Consensus* (Brill, 2015), 89.

atau golongan. Jika prinsip-prinsip ini diterapkan, akan semakin mendorong keterlibatan aktif masyarakat mengawasi jalannya pemerintahan, berakibat kepercayaan kepada pemerintah semakin tinggi.<sup>54</sup> Sinergi ini tidak hanya menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan etis, tetapi juga memperkuat fondasi persatuan bangsa dalam kerangka pluralisme. Integrasi antara moralitas kristiani dalam politik Calvin dan nasionalis inklusif Soekarnoisme dapat menghasilkan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan rakyat tanpa mengabaikan nilai-nilai spiritual yang mendasarinya. Pendekatan ini relevan bagi Indonesia yang kaya akan keberagaman budaya dan agama, di mana dialog antara agama dan nasionalisme menjadi kunci untuk menciptakan tata kelola yang inklusif dan berkeadilan.<sup>55</sup>

Meskipun integrasi antara moralitas Kristen dan nasionalisme Soekarno menawarkan pendekatan etika pemerintahan yang kuat, ada beberapa kritik dan tantangan yang perlu diperhatikan. Beberapa ahli berpendapat bahwa pemikiran Calvin lebih cocok diterapkan dalam sistem politik berbasis teokrasi atau dominasi Kristen.<sup>56</sup> Sementara itu, Indonesia adalah negara dengan pluralisme agama yang kuat. Oleh karena itu, ada risiko bahwa penerapan nilai-nilai moralitas Kristen dalam pemerintahan dapat memunculkan resistensi dari kelompok non-Kristen.<sup>57</sup> Selain itu, Soekarnoisme dengan semangat gotong royong dan nasionalisme inklusif dikawatirkan tidak selalu sejalan dengan prinsip teologi Calvin yang mengutamakan keterpanggilan individu dalam kepemimpinan.<sup>58</sup> Perdebatan ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual agar integrasi konsep ini dapat diterapkan tanpa mengorbankan prinsip pluralisme di Indonesia.

#### 4. Implementasi Praktis dalam Konteks Pemerintahan

Untuk menerapkan sinergi antara moralitas Kristiani dan nasionalisme Soekarno dalam konteks pemerintahan Indonesia, diperlukan langkah-langkah konkret yang

---

<sup>54</sup> VanDrunen, *Natural Law and the Two Kingdoms: A Study in the Development of Reformed Social Thought*, 45.

<sup>55</sup> Robert W Hefner, *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia* (Princeton University Press, 2011), 88.

<sup>56</sup> Nicholas Wolterstorff, *The Mighty and the Almighty: An Essay in Political Theology* (Cambridge University Press, 2012), 89.

<sup>57</sup> Hefner, *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*, 79.

<sup>58</sup> VanDrunen, *Natural Law and the Two Kingdoms: A Study in the Development of Reformed Social Thought*, 65.

didukung oleh rencana jangka Panjang dan kerja sama antar lembaga. Berikut adalah beberapa implementasi yang dapat dilakukan:

**a. Membentuk program pelatihan etika pemerintahan berbasis nilai-nilai moralitas Kristiani dan nasionalisme Soekarno.**

Program pelatihan ini bertujuan untuk membekali pejabat publik dengan pemahaman mendalam tentang pentingnya integritas, kejujuran, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Program ini dapat mencakup studi kasus tentang keberhasilan tata kelola pemerintahan yang etis dan inklusif, baik dari perspektif teologi Calvin maupun ideologi Soekarnoisme. Misalnya, penguatan pelatihan berbasis nilai moral dapat membantu mencegah korupsi dan meningkatkan akuntabilitas administrasi negara.<sup>59</sup> Selain itu, program ini dapat mengintegrasikan konsep gotong royong sebagai bentuk kerja sama lintas instansi dan komunitas dalam mewujudkan pelayanan publik yang efisien dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

**b. Mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan, integritas dan kejujuran dalam kebijakan publik, khususnya di sektor pelayanan publik dan pemberantasan korupsi.**

Prinsip keadilan, integritas dan kejujuran dalam kebijakan publik dapat diterapkan melalui pengambilan keputusan yang berfokus pada pemerataan akses layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kebijakan ini harus mempertimbangkan kebutuhan kelompok yang rapuh, termasuk masyarakat di daerah terpencil. Selain itu, penguatan sistem anti-korupsi, seperti penggunaan teknologi transparansi untuk memantau anggaran negara, dapat mencerminkan nilai-nilai moralitas Kristiani yang menuntut kejujuran dalam pemerintahan.<sup>60</sup> Prinsip keadilan, integritas dan kejujuran dapat diwujudkan dengan memastikan bahwa kebijakan publik tidak hanya berorientasi pada efisiensi ekonomi, tetapi juga memperhatikan dampaknya terhadap kesejahteraan sosial dan hubungan antar masyarakat.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> ENDI TRIYANTO MANYO'E, "INTERNALISASI NILAI-NILAI RELIGIUS PANCASILA GUNA PENCEGAHAN KORUPSI PADA PELAKSANAAN PELATIHAN DASAR (LATSAR) CPNS," *ACADEMIA: Jurnal Inovasi Riset Akademik* 3, no. 1 (2023): 69.

<sup>60</sup> Thomas D Fallace, "God's Politics. Why the Right Gets It Wrong and the Left Doesn't Get It," preprint, (ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD 2-4 PARK SQUARE, MILTON PARK . . ., 2007), 49.

<sup>61</sup> Fingfing Keren Grace Wong and Styadi Senjaya, "Prinsip-Prinsip Etika Kristen Dan Implementasinya Bagi Transformasi Kebijakan Dan Pelayanan Publik Di Indonesia," *Tumou Tou* 11, no. 2 (2024): 69.

**c. Meningkatkan peran lembaga pendidikan dalam mengajarkan nilai-nilai etis kepada generasi muda sebagai calon pemimpin masa depan.**

Institusi pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga universitas, memiliki tugas krusial dalam menanamkan prinsip-prinsip moral kepada generasi muda.<sup>62</sup> Kurikulum yang menggabungkan pendidikan etika berdasarkan moralitas dalam pemikiran politik Calvin dan nasionalisme Soekarno dapat membantu membentuk penerus yang trampil dan berkomitmen untuk melayani masyarakat dengan integritas, kejujuran, dan keadilan. Pendidikan karakter dapat dilengkapi dengan pelatihan kepemimpinan yang menekankan pentingnya transparansi, kerja sama lintas agama, dan empati dalam pengambilan Keputusan.<sup>63</sup>

Dengan langkah-langkah ini, pemerintah dapat mewujudkan tata kelola yang berlandaskan pada nilai-nilai moral dan nasionalisme yang kuat, yang tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga pada proses yang menjunjung tinggi keadilan, integritas dan kejujuran, serta transparansi. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintah dapat ditingkatkan melalui mekanisme transparansi yang mendukung akuntabilitas publik. Metode ini akan menghasilkan pemerintahan yang bebas dari korupsi, dan juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.

Penelitian ini memberikan sumbangan yang signifikan terhadap perkembangan studi etika pemerintahan dan filsafat politik di Indonesia. Penggabungan antara pemikiran politik Calvin dan Soekarno tidak hanya menawarkan sudut pandang baru dalam studi etika pemerintahan, tetapi juga dapat dijadikan dasar untuk merumuskan kebijakan publik yang lebih etis dan transparan.<sup>64</sup> Dalam kebijakan publik, hasil penelitian ini dapat diterapkan dalam program pelatihan etika bagi pejabat publik, di mana nilai-nilai moralitas, keadilan, dan gotong royong menjadi prinsip utama dalam pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini juga dapat dijadikan acuan bagi akademisi yang berkeinginan mengembangkan studi ini kearah yang lebih baik, mengenai hubungan agama, nasionalisme, serta tata kelola pemerintahan dalam konteks negara multikultural seperti Indonesia.

---

<sup>62</sup> Marvin W Berkowitz and Melinda C Bier, "What Works in Character Education: A Research-Driven Guide for Educators," (preprint, Washington, DC: Character Education Partnership, 2005), 75.

<sup>63</sup> Lloyd Duck, "Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility," *Childhood Education* 69, no. 4 (1993): 250–52.

<sup>64</sup> Magnis-Suseno, "Etika Politik. Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern." 74.

## 5. Relevansi dalam Konteks Pluralisme Indonesia

Integrasi moralitas kristen dalam kerangka Soekarnoisme menawarkan pendekatan yang inklusif untuk membangun pemerintahan yang responsif terhadap keragaman Indonesia. Nilai-nilai seperti keadilan, dan gotong royong, yang menjadi inti ajaran Kristiani<sup>65</sup>, dapat menjadi landasan bersama bagi seluruh elemen masyarakat. Melalui penerapan nilai-nilai ini dalam kerangka Soekarnoisme, tercipta dialog yang konstruktif dengan kelompok-kelompok agama dan etnis, yang pada akhirnya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam konteks pluralisme di Indonesia, penerapan asas-asas global seperti kesetaraan, integritas, dan kejujuran selaras dengan prinsip-prinsip Pancasila yang menekankan pada kemanusiaan yang adil dan beradab.<sup>66</sup> Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia menekankan pentingnya menghormati keragaman dan menegakkan kesetaraan bagi semua Masyarakat Indonesia.<sup>67</sup> Prinsip-prinsip ini menjadi dasar dalam membangun tata kelola pemerintahan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan seluruh rakyat Indonesia.<sup>68</sup>

Selain itu, penerapan nilai-nilai Kristiani dalam kerangka Soekarnoisme dapat memperkuat moderasi beragama di Indonesia. Moderasi beragama menekankan pentingnya sikap toleransi, penghargaan terhadap tradisi, dan penolakan terhadap ekstremisme.<sup>69</sup> Nilai-nilai seperti keadilan, panggilan dan gotong royong mendukung terciptanya masyarakat yang harmonis dan toleran, yang esensial dalam menjaga kerukunan antarumat beragama di Indonesia.<sup>70</sup> Dengan demikian, integrasi moralitas Kristiani dalam kerangka Soekarnoisme tidak hanya memperkuat nilai-nilai universal yang menjadi dasar negara, tetapi juga mendukung terciptanya pemerintahan yang inklusif dan responsif terhadap keragaman, serta memperkuat moderasi beragama di Indonesia.

---

<sup>65</sup> Nicholas Wolterstorff, *Justice in Love* (Wm. B. Eerdmans Publishing, 2015).

<sup>66</sup> Yohana R U Sianturi and Dinie Anggraenie Dewi, "Penerapan Nilai Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari Hari Dan Sebagai Pendidikan Karakter," *Jurnal Kewarganegaraan* 5, no. 1 (2021): 222–31.

<sup>67</sup> Novi Permita Laden, Hamdy Sukra; Sari, "Pancasila Sebagai Perikat Kebhinekaan Bangsa," *Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat* 3, no. 1 (2025): 116–24.

<sup>68</sup> Triyana Yohanes et al., "Kajian Ideologis Pancasila Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif," *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 02, no. 01 (2022): 92–113, <https://doi.org/10.52738/pjk.v2i1.82>.

<sup>69</sup> Jefrit Johanis Messakh et al., "Peran Pendidikan Agama Kristen Dalam Membangun Moderasi Beragama Di Era 5.0," *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 5, no. 5 (2023): 2165.

<sup>70</sup> Hedar, "NILAI-NILAI UNIVERSAL DALAM MODERASI BERAGAMA," Kementerian Agama RI Provinsi Sulawesi Barat, 2023, [https://sulbar.kemenag.go.id/opini/nilai-nilai-universal-dalam-moderasi-beragama-GOEiV?utm\\_source=chatgpt.com](https://sulbar.kemenag.go.id/opini/nilai-nilai-universal-dalam-moderasi-beragama-GOEiV?utm_source=chatgpt.com).

Penelitian ini terdapat beberapa batasan yang harus menjadi perhatian dalam studi selanjutnya. Pertama, metode yang diterapkan adalah studi literatur, sehingga belum ada pengujian empiris terkait penerapan konsep moralitas Kristen dalam pemikiran Calvin dalam konteks pemerintahan di Indonesia.. Penelitian lebih lanjut dengan pendekatan empiris, seperti wawancara dengan pejabat publik atau analisis kebijakan yang telah diterapkan, dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang efektivitas konsep ini dalam praktik pemerintahan..

Kedua, penelitian ini berfokus pada aspek normatif dan filosofis dari pemikiran Calvin dan Soekarnoisme. Namun, perlu dilakukan kajian yang lebih luas tentang bagaimana integrasi kedua konsep ini dapat diterapkan dalam sistem hukum dan administrasi negara Indonesia. Dengan demikian, penelitian di masa depan dapat mengembangkan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan etika politik, ilmu administrasi publik, dan sosiologi politik untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai etika pemerintahan berbasis moralitas dan nasionalisme.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi moralitas Kristen, khususnya teologi politik Calvin, dengan nasionalisme Soekarno dapat menciptakan etika pemerintahan yang lebih kuat dan responsif terhadap tantangan yang dihadapi Indonesia. Moralitas Kristiani, yang menekankan pada nilai-nilai seperti integritas, kejujuran, dan akuntabilitas, dapat berfungsi sebagai dasar etis dalam pengambilan keputusan publik. Dalam konteks ini, nilai-nilai tersebut sangat relevan untuk mengatasi isu-isu seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketimpangan sosial yang masih menjadi masalah utama di Indonesia.<sup>71</sup>

Di sisi lain, Soekarnoisme dengan semangat nasionalisme inklusif dan gotong royong memberikan landasan untuk membangun persatuan dan kesatuan bangsa. Prinsip-prinsip yang diusung oleh Soekarno berfokus pada pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan rakyat tanpa diskriminasi.<sup>72</sup> Dengan mengintegrasikan nilai-nilai moralitas Kristiani ke dalam kerangka Soekarnoisme, pemerintah Indonesia dapat

---

<sup>71</sup> Ira Ardila et al., "Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Tindakan Korupsi Bantuan Sosial Oleh Pejabat Publik Perspektif Max Weber," *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 13, no. 2 (2022): 226.

<sup>72</sup> Ir Soekarno, *Indonesia Menggugat* (Seno, 1956), 89.

menciptakan kebijakan yang lebih adil dan merata, serta memperkuat rasa kebersamaan di antara berbagai kelompok Masyarakat.

Sinergi antara moralitas Kristen dan Soekarnoisme tidak hanya bermanfaat bagi pemerintahan, tetapi juga penting untuk membangun budaya politik yang sehat dan transparan. Melalui kolaborasi lintas agama dan budaya, diharapkan tercipta dialog konstruktif yang mendukung moderasi beragama dan penghargaan terhadap keberagaman.<sup>73</sup> Dalam konteks pluralisme di Indonesia, pentingnya sikap toleransi dan saling menghargai di antara sesama umat beragama merupakan jalan yang baik dalam usaha memelihara keharmonisan dan stabilitas sosial.<sup>74</sup>

Dengan demikian, implementasi nilai-nilai moralitas Kristen dalam kerangka Soekarnoisme dapat menjadi solusi efektif untuk menghadapi berbagai tantangan pemerintahan di Indonesia. Penelitian ini menegaskan perlunya pendekatan holistik yang mencakup pendidikan etika bagi para pemimpin, penguatan kebijakan publik yang berbasis pada keadilan, serta peningkatan peran masyarakat dalam pengawasan pemerintah. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan Indonesia dapat menuju administrasi pemerintahan yang lebih etis dan usaha mencapai masyarakat Indonesia yang sejahtera.

Dalam konteks Indonesia yang mayoritas Muslim, penting juga menegaskan bahwa nilai-nilai moralitas Islam seperti amanah (tanggung jawab) dan 'adl (keadilan) sejalan dengan integritas dan keadilan yang diajarkan Calvin, serta semangat gotong royong dalam Soekarnoisme. Dengan demikian, sinergi yang dibangun bukan hanya antara moralitas Kristen dan nasionalisme Soekarno, tetapi juga terbuka bagi nilai-nilai agama lain, terutama Islam, sehingga benar-benar mencerminkan kolaborasi lintas agama, budaya, dan institusi sebagaimana ditegaskan dalam abstrak penelitian ini.

---

<sup>73</sup> Abdon Arnolus Amtiran and Arimurti Kriswibowo, "Kepemimpinan Agama Dan Dialog Antaragama: Strategi Pembangunan Masyarakat Multikultural Berbasis Moderasi Beragama," *Jurnal Penelitian Agama Hindu* 8, no. 3 (2024): 338.

<sup>74</sup> Derry Ahmad Rizal and Ahmad Kharis, "Kerukunan Dan Toleransi Antar Umat Beragama Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial," *KOMUNITAS* 13, no. 1 (2022): 38.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Hafidz. "Pemikiran Bung Karno Dan Cetak Biru Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan." *Educa News: Media Komunitas Pendidikan*, 2023.  
[https://edura.unj.ac.id/edura-news/?p=5891&utm\\_source=chatgpt.com](https://edura.unj.ac.id/edura-news/?p=5891&utm_source=chatgpt.com).
- Amtiran, Abdon Arnolus, and Arimurti Kriswibowo. "Kepemimpinan Agama Dan Dialog Antaragama: Strategi Pembangunan Masyarakat Multikultural Berbasis Moderasi Beragama." *Jurnal Penelitian Agama Hindu* 8, no. 3 (2024): 331–48.
- Ardila, Ira, Dede Annisa Fauziah, Karla Ryanda Putri, Ayu Firnanda, Muhammad Agus Hardiansyah, Pendidikan Sosiologi, and Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. "Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Tindakan Korupsi Bantuan Sosial Oleh Pejabat Publik Perspektif Max Weber." *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 13, no. 2 (2022): 222–34.
- Berkowitz, Marvin W, and Melinda C Bier. "What Works in Character Education: A Research-Driven Guide for Educators." Preprint, Washington, DC: Character Education Partnership, 2005.
- Calvin, John. *Calvin: Institutes of the Christian Religion*. Edited by John T McNeill. Westminster John Knox Press, 1960.
- . *Institutes of The Christian Religion*. Edited by John T. McNeill. Philadelphia: Westminster Press, 1960.
- Duck, Lloyd. "Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility." *Childhood Education* 69, no. 4 (1993): 250–52.
- Economic, U N, and Social Council. *Principles of Effective Governance for Sustainable Development*. E/2018/44-E/C. 16/2018/8, Retrieved from <https://publicadministratio n. un ...>, 2018.
- Edison, Edison, and Muhammad Andriansyah. "Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Sosial: Tinjauan Terhadap Kebijakan Pembangunan Di Indonesia." *Journal Development* 11, no. 2 (2023): 134–46.
- Fallace, Thomas D. "God's Politics. Why the Right Gets It Wrong and the Left Doesn't Get It." Preprint, ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD 2-4 PARK SQUARE, MILTON PARK ..., 2007.
- Götz, Norbert, and Carl Marklund, eds. *The Paradox of Openness: Transparency and Participation in Nordic Cultures of Consensus*. Brill, 2015.

- Gustaman, Budi. "Satwa Dan Nasionalisme Indonesia." Kumparan.Com, 2025.  
[https://kumparan.com/budi-gustaman-1706638739597966372/satwa-dan-nasionalisme-indonesia-23L4jEzHnnt?utm\\_source=chatgpt.com](https://kumparan.com/budi-gustaman-1706638739597966372/satwa-dan-nasionalisme-indonesia-23L4jEzHnnt?utm_source=chatgpt.com).
- Hedar. "NILAI-NILAI UNIVERSAL DALAM MODERASI BERAGAMA." Kementerian Agama RI Provinsi Sulawesi Barat, 2023. [https://sulbar.kemenag.go.id/opini/nilai-nilai-universal-dalam-moderasi-beragama-GOEiV?utm\\_source=chatgpt.com](https://sulbar.kemenag.go.id/opini/nilai-nilai-universal-dalam-moderasi-beragama-GOEiV?utm_source=chatgpt.com).
- Hefner, Robert W. *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. Princeton University Press, 2011.
- John Calvin. *Institutes of the Christian Religion*. Edited by John T. McNeill. Westminster John Knox Press, 1960.
- Kahin, George McT. *Nationalism and Revolution in Indonesia*. Cornell University Press, 2018.
- Kementerian Agama RI. *Moderasi Beragama*. 2023. <https://moderasi.kemenag.go.id/>.
- Kersten, Carool. *Islam in Indonesia: The Contest for Society, Ideas and Values*. Oxford University Press, 2015.
- Kristiyanto, Hasto. "'Geopolitik Bung Karno Progressive Geopolitical Coexistence'." *Universitas Pertahanan Republik Indonesia*, 2023.
- Kusman, Airlangga Pribadi. "Politik Sosio-Nasionalisme Sukarno Dan Kebangsaan Progresif." *Jurnal Pancasila* 3, no. 2 (n.d.): 65–79.
- Laden, Hamdy Sukra; Sari, Novi Permita. "Pancasila Sebagai Perikat Kebhinekaan Bangsa." *Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat* 3, no. 1 (2025): 116–24.
- Magnis-Suseno, Franz. "Etika Politik. Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern." Preprint, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- MANYO'E, ENDI TRIYANTO. "INTERNALISASI NILAI-NILAI RELIGIUS PANCASILA GUNA PENCEGAHAN KORUPSI PADA PELAKSANAAN PELATIHAN DASAR (LATSAR) CPNS." *ACADEMIA: Jurnal Inovasi Riset Akademik* 3, no. 1 (2023): 64–73.
- McCracken, Vic. *Christian Faith and Social Justice: Five Views*. Bloomsbury Publishing USA, 2014.
- McGrath, Alister E. *Christian Theology: An Introduction*. United Kingdom: Wiley-Blackwell, 2013.
- McKim, Donald K. *Introducing the Reformed Faith: Biblical Revelation, Christian Tradition, Contemporary Significance*. Westminster John Knox Press, 2001.

- McKim, Robert, and Jeff McMahan, eds. "The Morality of Nationalism." Preprint, Oxford University Press, July 10, 1997.  
<https://doi.org/10.1093/oso/9780195103915.001.0001>.
- Messakh, Jefrit Johanis, Esti Regina Boiliu, Djoys Anneke Rantung, and Lamhot Naibaho. "Peran Pendidikan Agama Kristen Dalam Membangun Moderasi Beragama Di Era 5.0." *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 5, no. 5 (2023): 2160–72.
- Muzakki, Akh. "Ethnic Chinese Muslims in Indonesia: An Unfinished Anti-Discrimination Project." *Journal of Muslim Minority Affairs* 30, no. 1 (2010): 81–96.
- Ningsih, Julianti Ratnasari, Fayla Lakmi Dara, and Widya Ananda Minda Putri. "Pancasila Sebagai Dasar Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial." *Advances In Social Humanities Research* 1, no. 4 (2023): 462–70.
- Orr, Robert D. "The Role of Christian Belief in Public Policy." *Christian Bioethics: Non-Ecumenical Studies in Medical Morality* 13, no. 2 (January 2007): 199–209.  
<https://doi.org/10.1080/13803600701473489>.
- Purwaningsih, Purwaningsih, Santy Yulianti, Dea Letriana Cesaria, and Kaniah Kaniah. "Pengabaian Hak-Hak Kewarganegaraan Kelompok Minoritas Dan Kegagalan Demokrasi Dalam Novel Maryam Karya Okky Madasari." *Aksara* 35, no. 2 (2023): 264–76.
- Rizal, Derry Ahmad, and Ahmad Kharis. "Kerukunan Dan Toleransi Antar Umat Beragama Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial." *KOMUNITAS* 13, no. 1 (2022): 34–52.
- Romualdi, Kristoforus Bagas. "Analisis Pemikiran Soekarno Tentang Nasionalisme." *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 10 (2024): 3761–66.
- Sani, Rafif, M Wildan Mufti, Gathan Sbastyen, Rendika Purnama, Razky Fawwaz, and Yuliana Yuli. "Implikasi Pejabat Publik Berkampanye Dalam Kontestasi Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 11 (2024).
- Saragih, Mima Defliyanti, and Yakobus Ndona. "Peningkatan Solidaritas Dan Kesejahteraan Bersama Dalam Sila Ke-5 Pancasila." *Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat* 2, no. 2 (2024): 215–21.
- Setiawan, Dede, Sulaiman Abdul Aziz, and Cecep Hilman. "Pengembangan Social Dan Pembangunan Pendidikan Berbasis Masyarakat." *Jurnal Inovasi, Evaluasi Dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP)* 2, no. 2 (2022): 74–84.

- Sianturi, Yohana R U, and Dinie Anggraenie Dewi. "Penerapan Nilai Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari Hari Dan Sebagai Pendidikan Karakter." *Jurnal Kewarganegaraan* 5, no. 1 (2021): 222–31.
- Soekarno, Ir. *Dibawah Bendera Revolusi*. Vol. 1. Bangkitlah Bangsaku, 1963.
- Stirling, K. Caileigh. "5 Facts about Muslims and Christians in Indonesia." Pew Research Center, 2024. [https://www.pewresearch.org/short-reads/2024/03/28/5-facts-about-muslims-and-christians-in-indonesia/?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.pewresearch.org/short-reads/2024/03/28/5-facts-about-muslims-and-christians-in-indonesia/?utm_source=chatgpt.com).
- Stoker, Laura. "Interests and Ethics in Politics." *The American Political Science Review* 86, no. 2 (January 1992): 369–80. <https://doi.org/10.2307/1964226>.
- Sukarno. *Nasionalisme, Islamisme Dan Marxisme*. Jajasan" Pembaruan", 1963.
- Sukarno, Ir. *Indonesia Menggugat*. Seno, 1956.
- Sulistiyono, Singgih Tri. "Nasionalisme, Negara-Bangsa, Dan Integrasi Nasional Indonesia: Masih Perlukah?" *Jurnal Sejarah Citra Lekha* 3, no. 1 (2018): 3–12.
- teknosional.com. "Sikap Nasionalisme Adalah Cinta Tanah Air." Teknosional.Com, 2024. [https://www.teknosional.com/sikap-nasionalisme-adalah/?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.teknosional.com/sikap-nasionalisme-adalah/?utm_source=chatgpt.com).
- Til, C Van. *Christian Theistic Ethics*. Westminster Theological Seminary, 1958.
- Tuininga, Matthew J. *Calvin's Political Theology and the Public Engagement of the Church: Christ's Two Kingdoms*. Cambridge University Press, 2017.
- Un, Antonius. "Pendasaran Teologis Bagi Pemikiran Politik John Calvin." *Verbum Christi: Jurnal Teologi Reformed Injili* 2, no. 1 (2015): 115–52.
- VanDrunen, David. *Natural Law and the Two Kingdoms: A Study in the Development of Reformed Social Thought*. Wm. B. Eerdmans Publishing, 2010. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=jnd9vRw51TwC&oi=fnd&pg=PR9&dq=VanDrunen,+David.+Natural+Law+and+the+Two+Kingdoms:+A+Study+in+the+Development+of+Reformed+Social+Thought.+Wm.+B.+Eerdmans,+2010.&ots=cPQc2hNP4c&sig=1EPRaEPNUsuFQ-7BH4kI4SUJQ10>.
- . *Natural Law and the Two Kingdoms: A Study in the Development of Reformed Social Thought*. Wm. B. Eerdmans Publishing, 2010.
- Varanida, Dea. "Keberagaman Etnis Dan Budaya Sebagai Pembangunan Bangsa Indonesia." *PROYEKSI Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 23, no. 1 (2018): 36–46. <https://doi.org/10.26418/proyeksi.v23i1.2444>.

- Wells, David F. *The Courage to Be Protestant: Truth-Lovers, Marketers, and Emergents in the Postmodern World*. Wm. B. Eerdmans Publishing, 2008.
- Winarjo, Hendra. "John Calvin Tentang Kerja Dan Relevansinya Dengan Pekerja Kristen Kontemporer Di Indonesia." *Societas Dei: Jurnal Agama Dan Masyarakat* 10, no. 1 (2023): 105–19.
- Wolin, Sheldon S. "Calvin and the Reformation: The Political Education of Protestantism." *The American Political Science Review* 51, no. 2 (January 1957): 428–53. <https://doi.org/10.2307/1952201>.
- Wolterstorff, Nicholas. *Justice in Love*. Wm. B. Eerdmans Publishing, 2015.
- . *The Mighty and the Almighty: An Essay in Political Theology*. Cambridge University Press, 2012.
- Wong, Fingfing Keren Grace, and Styadi Senjaya. "Prinsip-Prinsip Etika Kristen Dan Implementasinya Bagi Transformasi Kebijakan Dan Pelayanan Publik Di Indonesia." *Tumou Tou* 11, no. 2 (2024): 68–81.
- Yohanes, Triyana, Y Sari Murti Widiyastuti, D Krismantoro, and B Hestu Cipto Handoyo. "Kajian Ideologis Pancasila Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif." *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 02, no. 01 (2022): 92–113. <https://doi.org/10.52738/pjk.v2i1.82>.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.